

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Diskusi Analisis Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) di Kementerian/Lembaga *Studi Kasus: Major Project Kereta Api Makassar – Pare pare di Kementerian Perhubungan*

Selasa-Rabu, 2-3 November 2021

I. LATAR BELAKANG

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 (PP 17/2017) tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, diantaranya mengatur tentang proses perencanaan dan penganggaran tahunan mencakup antara lain penyusunan prioritas nasional sampai dengan level proyek; proses perencanaan dan penganggaran tahunan termasuk pengintegrasian sumber-sumber pendanaan (belanja K/L, Non-K/L, Transfer Daerah, Dana Desa, BUMN/Swasta, dan KPBU) dalam RKP; pendekatan penganggaran yang berbasis program (*money follow program*); mekanisme kerja Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan; serta berbagi data perencanaan dan penganggaran (sistem informasi perencanaan dan penganggaran). Sejak tahun 2018, Bappenas telah melakukan implementasi peraturan tersebut dengan melakukan perencanaan hingga level proyek dari masing-masing instansi pelaksana yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan terus melakukan peningkatan dengan memastikan proyek-proyek yang didanai merupakan proyek prioritas yang harus segera diselesaikan.

Untuk memperkuat fokus pelaksanaan prioritas terhadap proyek-proyek penting, pada RPJMN 2020-2024, telah ditetapkan kebijakan baru dalam prioritas yang juga diharapkan dapat secara konkrit menyelesaikan isu-isu pembangunan, memiliki sifat terukur serta bernilai strategis dan daya ungkit tinggi, yaitu Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Dalam perencanaan jangka menengah tersebut, terdapat 41 *major project* yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

Kereta Api Makassar – Pare pare merupakan bagian dari Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030 dengan target keseluruhan terbangunnya jalur kereta api sepanjang 10.524 km. Proyek yang mulai dilaksanakan sejak 2014 ini, dibangun sebagai akibat dari kurang memadainya jalan arteri lintas barat Sulawesi koridor Makassar – Barru – Parepare untuk menjadi jalur logistik, sehingga diperlukan transportasi lain untuk menjadi jalur utama distribusi batu bara dari beberapa Pelabuhan menuju ke beberapa kawasan industri dan pabrik semen yang terdapat di Sulawesi. Dilihat dari tujuan dan manfaat awal dari pembangunan kereta api ini (memiliki daya ungkit tinggi, nilai strategis, dan dapat menjawab isu transportasi di daerah Sulawesi), maka proyek ini dimasukkan ke dalam *major project* untuk meluncurkan pelaksanaannya dan memastikan penganggarnya difokuskan juga pada MP tersebut.

Dalam melaksanakan amanat PP 17/2017 di atas, khususnya berkaitan dengan penyusunan perencanaan dan penganggaran hingga pengendalian di level proyek serta untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, maka disusunlah kajian ini. Selain itu, dengan melihat potensi dari Kereta Api Makassar-Pare pare dan telah ditetapkan proyek tersebut menjadi salah satu *major project* yang diharapkan dapat tuntas terselesaikan pada 2024, maka dilakukan kunjungan lapangan ke lokasi pelaksanaan proyek. Kunjungan lapangan yang dimaksudkan nantinya berupa diskusi dengan Bappeda Provinsi terkait untuk mengetahui keselarasan perencanaan pusat dan daerah, serta survei langsung ke lokasi proyek di daerah Makassar dan sekitarnya. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kunjungan lapangan yang dimaksudkan tersebut.

II. TUJUAN DISKUSI

Secara umum tujuan dari pelaksanaan diskusi dalam rangka kajian “**Analisis Proyek Prioritas Strategis (Major Project) di Kementerian/Lembaga, Studi Kasus Major Project Kertea Api Makassar – Pare pare di Kementerian Perhubungan**” di Kota Makassar, Sulawesi Selatan adalah untuk mengidentifikasi keselarasan perencanaan hingga pelaksanaan baik dari sisi program maupun pendanaan. Secara detail tujuan kegiatan ini:

1. Mengidentifikasi tujuan dan manfaat, serta target dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai dari pembangunan Kereta Api Makassar-Pare pare;
2. Mengidentifikasi keselarasan perencanaan *masterplan* atau *road map* yang sudah disusun dengan pelaksanaannya dan melihat progres pelaksanaan di lapangan;
3. Mengidentifikasi peranan pemerintah daerah dan BUMN/swasta pada pelaksanaan proyek.

III. KELUARAN YANG DIHARAPKAN

Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan diskusi kajian “**Analisis Proyek Prioritas Strategis (Major Project) di Kementerian/Lembaga, Studi Kasus Major Project Kertea Api Makassar – Pare pare di Kementerian Perhubungan**” di Kota Makassar, Sulawesi Selatan adalah:

1. Teridentifikasinya kesesuaian antara tujuan dan manfaat, serta target dan sasaran dalam perencanaan dengan konsep pembangunan Kereta Api Makassar-Pare pare yang sudah dilaksanakan;
2. Teridentifikasinya proses dan progres pelaksanaan kegiatan pembangunan di lapangan beserta kendala yang dihadapi; serta
3. Teridentifikasinya peranan pemerintah daerah dalam mendukung terlaksananya *major project*.

IV. PERTANYAAN KUNCI DALAM DISKUSI

Untuk menjawab tujuan dan keluaran di atas, pertanyaan kunci yang akan didiskusikan lebih lanjut antara lain adalah:

1. Bagaimana keterlibatan dan pembagian peran K/L, pemerintah daerah, dan BUMN/Swasta dalam pelaksanaan MP Makassar-Pare pare?
2. Bagaimana pemerintah daerah menyelaraskan perencanaan daerahnya agar dapat mendukung pelaksanaan MP, terutama Kereta Api Makassar-Pare pare?
3. Apakah tujuan dan manfaat utama dari pelaksanaan MP Kereta Api Makassar-Pare pare? Apakah sudah sesuai dengan konsep pembangunan yang sekarang dilakukan?
4. Bagaimana progres pelaksanaan MP Kereta Api Makassar-Pare pare dibandingkan dengan *masterplan* atau *road map* yang telah direncanakan sebelumnya? Apakah target operasinya akan sesuai dilaksanakan pada 2022?

V. PESERTA DISKUSI

Kegiatan diskusi “**Analisis Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) di Kementerian/Lembaga, Studi Kasus *Major Project* Kertea Api Makassar – Pare pare di Kementerian Perhubungan**” di Kota Makassar, Sulawesi Selatan akan diikuti oleh konsultan yang ditunjuk. Beberapa pihak atau Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan diskusi ini adalah :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Dinas Perhubungan, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan; dan
5. Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur.

VI. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan diskusi terkait dengan kajian “**Analisis Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) di Kementerian/Lembaga, Studi Kasus *Major Project* Kertea Api Makassar – Pare pare di Kementerian Perhubungan**” di Kota Makassar, Sulawesi Selatan akan dilaksanakan pada:

Tanggal	Agenda	Peserta	Lokasi
02 November 2021	Kunjungan Lapangan Progres Pelaksanaan Kereta Api Makassar-Pare pare (antara lain Segmen 3 (Kab Pangkep & Kab Maros), serta Segmen 6 Siding Tonasa (Kab Pangkep) & Emplasemen Garongkong (Kab Barru))	1. BPKA Sulawesi Selatan; dan 2. BTP Wilayah Jawa Bagian Timur.	Makassar dan sekitarnya (titik pembangunan KA)
03 November 2021	Diskusi perencanaan daerah dalam mendukung pelaksanaan <i>Major Project</i>	1. Bappelitbangda Prov. Sulawesi Selatan; 2. Dinas Perhubungan Prov. Sulawesi Selatan; serta 3. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Prov. Sulawesi Selatan.	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulawesi Selatan

VII. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan diskusi dalam rangka kajian **“Analisis Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) di Kementerian/Lembaga, Studi Kasus *Major Project* Kertea Api Makassar – Pare pare di Kementerian Perhubungan”** di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kedeputan Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas. Besar harapan kami akan partisipasi Bapak/Ibu dalam memberikan masukan dan saran dalam diskusi demi tercapainya tujuan dari pelaksanaan kegiatan.

LAMPIRAN I. DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa saja kendala-kendala pelaksanaan MP KA Makassar-Pare selama ini?
2. Apakah terjadi kemunduran pelaksanaan MP KA Makassar-Pare pare di 2020 dan 2021 akibat adanya pandemi? Jika ya, seberapa besar hal tersebut berpengaruh pada perencanaan tahun selanjutnya? Lalu bagaimana rencana penyelesaiannya?
3. Bagaimana proses koordinasi Daerah-Swasta-Pusat dalam penyelesaian MP KA Makassar Pare?
4. Kapan pembangunan KA Makassar-Pare pare direncanakan selesai dan dapat beroperasi 100%?
5. Bagaimana akses masyarakat untuk menggunakan KA ini? Bagaimana integrasi antar moda yang ada di sekitarnya?
6. Apakah ada terdapat proyek lain yang juga diharapkan dapat mendukung tujuan pemanfaatan dari proyek Kereta Api Makassar - Pare pare?
7. Bagaimana komitmen dari pemerintah daerah dalam mendukung pemeliharannya?
8. Setelah target pembangunan KA Makassar-Pare pare dalam MP ini selesai, apakah akan ada kelanjutan pembangunan kereta di daerah Sulawesi?

LAMPIRAN II. BAHAN YANG DIBUTUHKAN

1. *Road map* atau *masterplan* atau gambaran dan tahapan pelaksanaan *major project* Kereta Api Makassar – Pare pare, termasuk rencana penyelesaian yang sudah disusun oleh Kementerian Perhubungan
2. Perencanaan daerah berkaitan dengan pelaksanaan *major project* Kereta Api Makassar – Pare pare